KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menakar efektivitas WFH satu hari di sektor swasta
Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Menakar Efektivitas WFH Satu Hari Di Sektor Swasta

Kebijakan Pemerintah yang mengatur *Work From Home* (WFH) untuk karyawan swasta menjadi perbincangan.

Muncul kekhawatiran dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), bahwa adanya WFH bagi swasta, justru akan menggeser biaya dari perusahaan ke pekerja. Namun, kekhawatiran itu dibantah oleh Anggota Komisi IX DPR.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran, Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan WFH. Meski tidak wajib seperti ASN, perusahaan tetap dianjurkan menerapkan WFH minimal satu hari dalam seminggu dengan ketentuan tertentu.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut, kebijakan ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

"Untuk pekerja swasta, sifatnya hanya anjuran. Ketika banyak pilihan hari, maka kemudian ketika kita ingin *in line* dengan teman-teman ASN, itu pilihannya bisa hari Jumat," ujarnya dalam jumpa pers, Rabu (1/4/2026).

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home (WFH) dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk perusahaan swasta, tetapi juga mencakup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara garis besar, Pemerintah mendorong perusahaan untuk mulai menerapkan WFH sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif dan tetap produktif.

Namun, berbeda dengan ASN, pelaksanaannya tidak harus di hari tertentu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan. Yassierli menegaskan, setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, aturan teknis WFH tidak dibuat kaku.

"Masing-masing perusahaan memiliki karakteristik kekhasan masing-masing, sehingga teknisnya kita kembalikan kepada perusahaan masing-masing," lanjutnya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat angkat bicara terkait kebijakan WFH bagi buruh. Menurut dia, dengan adanya WFH, justru berpotensi terjadi pergeseran beban biaya dari perusahaan ke pekerja.

"Pengalaman selama pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa WFH justru meningkatkan pengeluaran rumah tangga," ungkap Mirah, Senin (6/4/2026).

Selain itu, Mirah menegaskan, bahwa penerapan WFH tidak bisa diseragamkan di semua sektor. "Pekerja di bidang manufaktur, layanan jasa, dan pekerjaan lapangan, misalnya, tidak memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari rumah," tegasnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menilai, WFH bagi sektor swasta bisa memberikan kontribusi dalam penghematan energi. Dia pun yakin, bahwa beban perusahaan tidak akan bergeser kepada pekerjanya saat WFH.

"Agar kekhawatiran pekerja tidak terjadi, Pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenakerjaan wajib membuat edaran terkait tidak adanya pemotongan gaji," ujar Irma kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (8/5/2026)

Untuk mengetahui pandangan dari Mirah Sumirat dan Irma Suryani Chaniago mengenai kebijakan WFH untuk sektor swasta, berikut wawancaranya.

MIRAH SUMIRAT, Presiden Aspirasi

Beban Pekerja Bayar Listrik & Internet Naik



> Tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja atau buruh.

Apa pendapat Anda terkait imbauan penerapan *Work From Home* (WFH) bagi perusahaan swasta?

Kami menilai rencana penerapan WFH satu hari dalam seminggu sebagai langkah yang memiliki niat baik, khususnya dalam upaya penghematan BBM serta mengurangi beban mobilitas harian pekerja atau buruh. Kebijakan ini juga berpotensi menekan kemacetan dan memberikan ruang efisiensi bagi sebagian pekerja. Namun, kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.

Sektor apa saja yang tidak memungkinkan dilakukan WFH?

Banyak jenis pekerjaan, terutama di sektor manufaktur, layanan, dan pekerjaan lapangan, yang secara karakter tidak memungkinkan WFH. Karena itu, penerapannya harus mempertimbangkan keadilan antar pekerja atau buruh agar tidak menimbulkan kesenjangan. Selain itu, perlu dikaji secara menyeluruh terutama dari sisi dampak ekonomi terhadap pekerja atau buruh.

Menurut Anda, apa dampak ekonomi bagi pekerja jika diterapkan WFH?

Menurut kami, tanpa skema perlindungan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban biaya dari negara dan perusahaan kepada pekerja atau buruh.

Kenapa bisa terjadi peralihan beban biaya dari perusahaan ke pekerja?

Pengalaman saat pandemi Covid-19, pekerja atau buruh yang menjalankan WFH mengalami kenaikan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk listrik dan internet. Rata-rata tambahan biaya listrik rumah tangga diperkirakan meningkat 10-20 persen, tergantung penggunaan perangkat kerja seperti laptop, pendingin ruangan, dan pencahayaan. Sementara itu, biaya internet yang memadai untuk pekerjaan profesional dapat mencapai Rp 300 ribu-Rp 700 ribu per bulan.

Adakah dampak lainnya?

Tanpa pengaturan yang jelas, WFH juga dapat menyebabkan jam kerja menjadi tidak terkontrol dan berisiko meningkatkan beban kerja terselubung. Hal ini berpotensi menurunkan produktivitas jangka panjang serta meningkatkan risiko kelelahan kerja. ■ NNM

IRMA SURYANI CHANIAGO, Anggota Komisi IX DPR

Pemerintah Harus Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji



> Bagi perusahaan yang melakukan pemotongan gaji, harus diberi sanksi dan diwajibkan membayar kembali potongan tersebut.

Bagaimana pandangan Anda terkait dengan *Work From Home* (WFH) bagi swasta?

Menurut saya, WFH memang tidak bisa diseragamkan di sektor swasta. Terutama di pabrikan, karena pendapatan perusahaan atau pabrik tergantung pada produktivitas produksi.

Apa yang menjadi target WFH bagi sektor swasta, khususnya pabrikan?

Jangan sampai pendapatan pabrik menurun, akan berimbas pada pendapatan pekerja (baik dari lembur maupun dari bonus atau premi).

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai, kebijakan WFH berpotensi terjadi pergeseran beban biaya dari perusahaan ke pekerja. Apa tanggapan Anda dengan kekhawatiran ini?

Agar kekhawatiran pekerja tidak terjadi, Pemerintah dalam hal ini Menaker wajib membuat edaran terkait tidak adanya pemotongan gaji. Bagi perusahaan yang melakukan pemotongan, harus diberi sanksi dan diwajibkan membayar kembali potongan tersebut.

Menurut Anda, apakah benar terjadi pergeseran beban dari perusahaan ke pekerja jika WFH?

Jika terkait pergeseran beban dari perusahaan ke pekerja, maaf saya tidak tahu apa yang dimaksud Mbak Mirah, karena sebetulnya yang dapat di-WFH adalah pekerjaan yang bisa ditangani dari rumah, bukan yang berkaitan dengan proses produksi di lapangan.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah agar kekhawatiran dari buruh ini tidak terjadi?

Jangan sampai WFH malah diangap hari libur dan malah digunakan untuk rekreasi.

Apakah skema WFH satu hari dalam sepekan bisa menekan penggunaan energi?

Menurut saya tentu bisa, sepanjang pekerjanya disiplin. Dalam situasi darurat energi seperti sekarang, rakyat memang wajib ikut berperan serta mengurangi pemakaian yang tidak perlu, meskipun Pemerintah menyatakan cadangan energi kita cukup. ■ NNM